



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us  
(021) 22859672

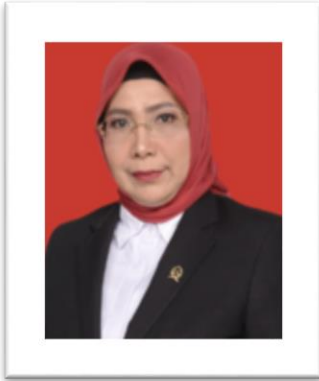


More Information  
[www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)



Our Office  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,  
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950

## KATAPENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) pada Mahkamah Agung RI dan badan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomer : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”**.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerja sama dalam penyusunan laporan LkjIP.

Jakarta, 26 Februari 2024

Ketua,



Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

Nip. 197210261992032001

## EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer : 4107/SEK/OT.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 *Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023.*

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2023.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2023 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 dengan Pagu DIPA 526732 sebesar Rp. 16.249.915.000,- ( *Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah* ) dan Pagu DIPA 525733 sebesar Rp. 49.550.000,- ( *Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu* ).

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2023. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Executive Summary .....	iii
Daftar isi .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	3
C. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II     Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	11
B. Rencana Kinerja .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>16</b>
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	16
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	16
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	22
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	23
4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	24
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	28
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	30
B. <b>REALISASI ANGGARAN / AKUNTABILITAS KEUANGAN</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## **LAMPIRAN**

1. SK TIM Penyusunan LkjIP ;
2. Struktur Organisasi ;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ;
4. Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 ;
5. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2024 ;
6. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2025 ;
7. Perjanjian Kinerja Tahunan ( PKT ) Tahun 2024 ;
8. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 ;
9. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ;
10. Penghargaan : Juara favorit pada lomba Lomba Peningkatan  
Pelayanan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama



Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# BAB I PENDAHULUAN



## A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan

hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara / pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta *Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT.6/12/2023* tanggal 19 Desember 2023 *Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023*.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

### 2. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur ( SOP )*, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai

implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi .
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan .
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi .
6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

**Kondisi-kondisi** tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( right sizing )* yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama .
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS .
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) .
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli .
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,.
6. Tata persidangan .
7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim .
8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara.
10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara .
11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi .
12. Publikasi putusan (Direktori Putusan).



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.

### **BAB IV**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

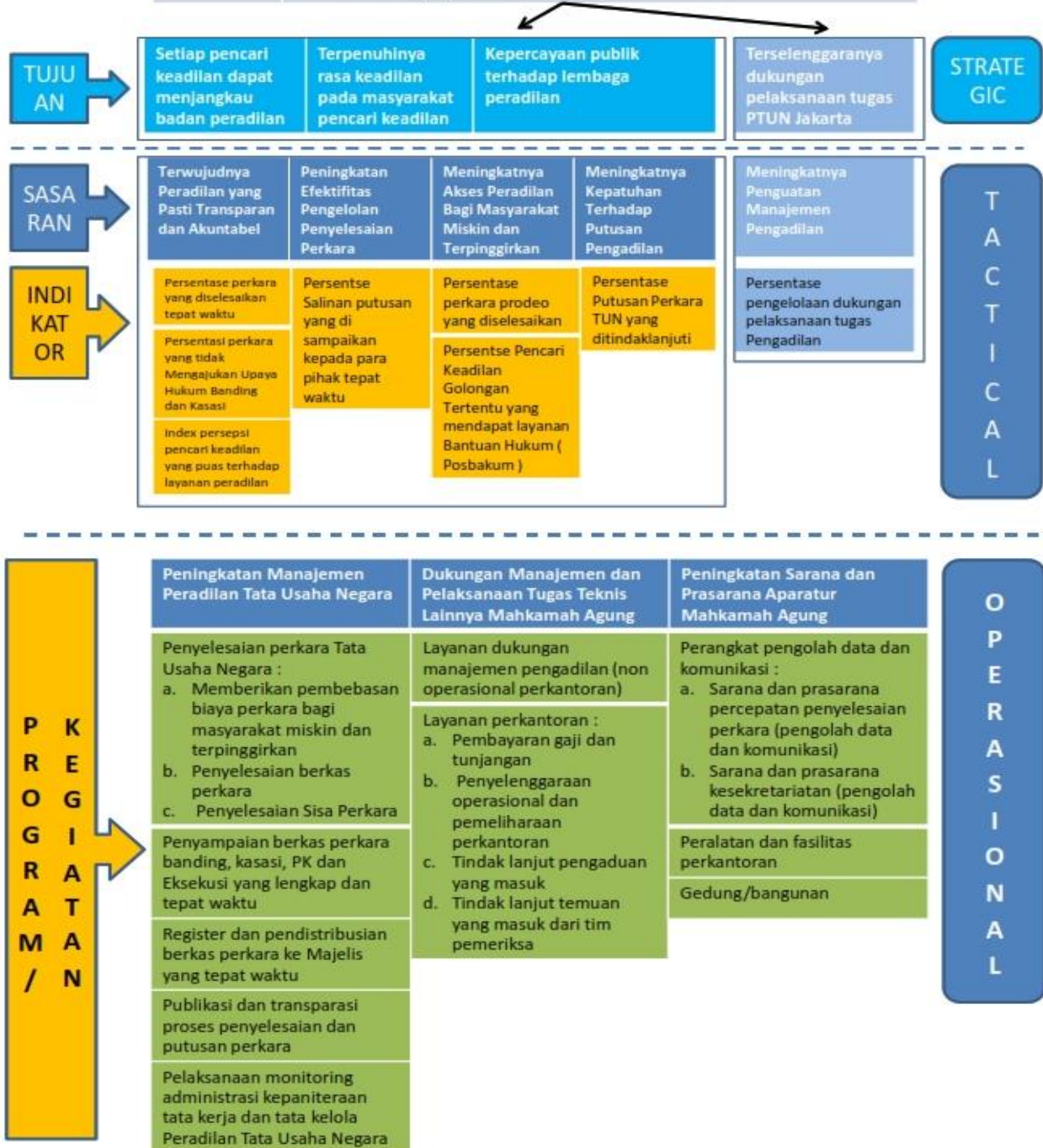
### **Lampiran**

Perjanjian Kinerja (PK) Satker, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya, serta lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)

# POHON KINERJA

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

<b>Visi</b>	<b>Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung</b>
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat</li> <li>c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien</li> <li>d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien</li> <li>e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>





Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA



## **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 438/KPTUN.W2.TUN.1/RA.1.3/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024, telah di susun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024, Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024:

### **1. VISI MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah:

#### **“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan di tetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun **Tujuan** yang hendak di capai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

**Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan , sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
  - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentse Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentse Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase Putusan  
- Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

### 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

##### 1. Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, meliputi:

- Memberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Penyelesaian berkas perkara.
- Penyelesaian Sisa Perkara.

##### 2. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi yang lengkap dan tepat waktu.

##### 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

##### 4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

##### 5. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Negara.

#### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

##### 1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional perkantoran).

##### 2. Layanan perkantoran, meliputi :

- Pembayaran gaji dan tunjangan.
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi, meliputi:
  - Sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara (pengolah data dan komunikasi).
  - Sarana dan prasarana kesekretariatan (pengolah data dan komunikasi)
2. Peralatan dan fasilitas perkantoran, meliputi : peralatan dan fasilitas perkantoran.
3. Gedung/bangunan, meliputi: gedung dan bangunan.

**B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Rencana kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

### Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	30% 30%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( POSBAKUM )	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%

#### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	30% 30%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( POSBAKUM )	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%



Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja secara garis besarnya adalah dimaksudkan untuk sebagai alat untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan rencana strategis tahun ke empat dalam renstra 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja.

### **A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini :

**Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi	30% 30%	34% 25,35%	113% 84,5%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	97,13	97,13 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( POSBAKUM )	100 %	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%

## 1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

### a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Sisa Perkara Tahun 2022 = 169 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2023 = 671 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2023 = 511 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2023 = 194 Perkara

**Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%**

**Jumlah perkara yang diselesaikan**

**840 Perkara x 100% = 100 %**

**840 Perkara**

#### Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

### b. Presentase Perkara yang yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

**Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi X 100%**  
**Jumlah perkara diselesaikan**

#### • Banding

Perkara Putus Tahun 2023 = 653 Perkara  
Perkara Banding = 367 Perkara  
Perkara Tidak Banding = 286 Perkara

286 Perkara x 100% = 34 %  
840 Perkara

#### • Kasasi

Perkara Banding Tahun 2023 = 367 Perkara  
Perkara Kasasi = 154 Perkara  
Perkara Tidak Kasasi = 213 Perkara

213 Perkara x 100 % = 25,35 %  
840 Perkara

c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus  $\geq 80$ .

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah **97,13** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51 sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,94	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,93	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,89	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,93	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,8	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,98	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,88	Sangat Baik

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{511 \text{ Perkara}}{511 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

**Catatan :**

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

## 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100 \%$$

- b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{97 \text{ Orang}}{97 \text{ Orang}} \times 100 \% = 100 \%$$

## 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Penetapan BHT = 109 Perkara

$$\frac{109 \text{ Perkara}}{109 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

**Catatan :**

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi

**Matrik Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Tahun 2023**

No.	Perkara	Sisa Tahun lalu Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus	Sisa Perkara
1.	Gugatan Tk. I	169 Perkara	671 Perkara	511 Perkara	194 Perkara
2.	Permohonan	0 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
3.	Banding	70 Perkara	406 Perkara	234 Perkara	233 Perkara
4.	Kasasi	88 Perkara	156 Perkara	119 Perkara	125 Perkara
5.	PK	38 Perkara	43 Perkara	31 Perkara	50 Perkara
6.	Eksekusi	0 Perkara	24 Perkara	0 Perkara	0 Perkara

## A.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	100%	-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	102%	102%	100%	102%	102%	100%
		c.	Persentase Penurunan Sisa Perkara	19,4%	19,4%	-	77,6%	77,6%	-
		d.	Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum						
			- Banding	58,3%	58,30%	34%	97,16%	97,16%	113%
			- Kasasi	12,7%	12,70%	25,35%	63,5%	63,5%	84,5%
	- PK	48%	48%	-	68,57%	68,57%	-		
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pradilan	96,3%	96,03%	97,13%	96,03%	96,03%	97,13%		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%	-
		c.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam 1 hari sejak diputus	0%	-	-	0%	-	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	100%	100%	0%	100%	100%
		b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM )	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	78,3%	102%	102%	100%	-	
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	25%	25%	25%	-	-	108%	19,4%	19,4%	-	-	
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum											
		- Banding	60%	50%	50%	30%	34%	100%	58,3%	58,30%	34%	-	
		- Kasasi	60%	20%	20%	30%	25%	110%	12,7%	12,70%	25,35%	-	
		- PK	60%	70%	70%	-	-	124,6%	48%	48%	-	-	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	100%	100%	100%	91,51%	96,3%	96,03%	97,13%	-	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam 1 hari sejak diputus	0%	100%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	-	
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM )	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	

**A.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;**

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja pada tahun 2023, hasil capaian kinerja dari enam sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam analisis sebagai berikut :

**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel**

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud pelayanan perkara yang cepat menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan access to justice yang baik. Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum			
		- Banding	30%	34%	113%
		- Kasasi	30%	25,35%	84,5%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pradilan	100 %	97,13%	97,13%

- a. Jumlah Perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak **840** Perkara, yang terdiri dari :
  - Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak **169** Perkara.
  - Perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak **671** Perkara.
- b. Perkara yang diputus pada tahun 2023 sebanyak **511** Perkara.

- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2023 sebanyak **247** Perkara, dari Perkara Putus tahun 2023 sebanyak **653** Perkara.
- d. Index Responden Pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan pada tahun 2023 sebanyak **97,13 %** Responden.

**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %

- a. Minutasi Perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 653 Perkara, dari **653** Perkara yang Putus ditahun 2023 ;
- b. Perkara permohonan Banding pada tahun 2023 sebanyak **406** Perkara, permohonan Kasasi pada tahun 2023 sebanyak **156** Perkara, dari Seluruh Putusan Perkara tahun 2023 sebanyak **653** Perkara ;

**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( POSBAKUM )	100 %	100 %	100 %

- a. Jumlah Perkara Prodeo yang masuk dan harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 1 Perkara dari 1 Perkara Masuk Prodeo tahun 2023 ;

b. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) sebanyak **97** Orang pada tahun 2023 ;

Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan presentase perkara TUN yang ditindak lanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

a. Permohonan Eksekusi yang diajukan pihak pada tahun 2023 sebanyak **24** perkara.

Keadaan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023  
sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	Rp. 1.239.369.037			
2	Penerimaan Tahun ini		Rp. 1.728.375.150		
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan			Rp. 168.650.000	
4	Biaya Panggilan			Rp. 75.567.500	
5	Biaya Pemberitahuan			Rp. 95.362.000	
6	Biaya Pemeriksaan Setempat			Rp. 254.030.600	
7	Pengiriman Biaya Perkara			Rp. 269.310.000	
8	Materai			Rp. 7.370.000	
9	PNBP a. Pendaftaran b. Redaksi c. Lainnya d. Sisa Panjar dibayar			Rp. 61.455.000 Rp. 14.740.000 Rp. 68.012.500 Rp. 22.193.700	
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara			Rp. 199.630.527	
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media			-	
12	Pemberkasan dan Pengiriman			Rp. 143.056.250	
	Jumlah	Rp. 1.239.369.037	Rp. 1.728.375.150	Rp. 1.379.378.077	Rp. 1.588.366.110

## A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dikelola dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dijabarkan dalam indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) berikut ini.

### IKPA DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	175	005	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	66.91	99.98	100.00	100.00	83.80	100.00	100.00	95.07	100%	95.07
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.69	20.00	10.00	10.00	8.38	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	83.46		96.76					100.00			

Nilai IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan nilai akhir 95,07 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 99,58 capaian output masing-masing sebesar 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya secara ril. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran ini telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 95,96, diperoleh hasil/output yang maksimal, yakni senilai 100%.

## IKPA DIPA 05 DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	175	005	526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	45.90	91.21	0.00	0.00	87.52	100.00	100.00	71.58	80%	89.48
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	4.59	18.24	0.00	0.00	8.75	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	72.95		92.91			100.00					

Nilai IKPA Dipa 05 Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan nilai akhir 89,48 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 91,21 dan capaian output sebesar 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran ini juga telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 91,21 diperoleh hasil / output yang maksimal, yakni senilai 100%.

#### A.6. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2023 dan untuk jangka menengah tahun 2020 – 2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana Internal di Lingkungan Mahkamah Agung.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi merupakan kegiatan memiliki indicator kinerja yaitu presentase realisasi anggaran belanja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1	Layanan Umum	1	Laporan	99,99%	99,11%
2	Layanan Perkantoran	1	Layanan	100%	93,78%

Sumber data: Detail Kerja Capaian RO (OM SPAN)

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang memiliki indicator kinerja kegiatan yaitu realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Adapun keluaran kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1	Layanan Sarana Internal	2	Unit	100%	90%

Sumber data: Detail Kerja Capaian RO (OM SPAN)

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. program penyelesaian perkara,
2. peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.
5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pencapaian perjanjian atau pernyataan kinerja itu telah tercantum dalam program / kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama peradilan tata usaha negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pelaksanaan ke enam program di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di lakukan dengan sasaran – sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur dalam segi waktu dan capaiannya. Sasaran – sasaran dan indikator – indikator tersebut semuanya dituangkan dalam dokumen Renstra dan IKU. Hasil capaian yang telah dilakukan oleh PTUN Jakarta pada Tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023, hal tersebut dapat digambarkan secara umum berupa Capaian Kinerja PTUN Jakarta telah sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Tahun 2023 yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari dua DIPA yaitu :

1. **DIPA BUA** : DIPA-005.01.2.526732/2023 Jumlah anggarannya sebesar Rp. 16.249.915.000,- dipergunakan untuk 2 Program Kegiatan, yang realisasi penyerapannya sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Dukungan Manajemen	16.239.915.000	15.277.438.838	94,07 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	10.000.000	9.000.000	90 %

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	13.465.441.000	12.520.923.427	944.517.573	-

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	2.767.724.000	2.749.825.411	17.898.589	-

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2023 Untuk PTUN Jakarta Mendapat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,- Dengan Perincian :

- Belanja Pegawai Rp. 13.465.441.000,-
- Belanja Barang Rp. 2.767.724.000,-
- Belanja Modal Rp. 10.000.000,-

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	16.239.915.000	15.277.438.838	962.476.162	-

## 2. DIPA DIRJEN BADILMILTUN DIPA -005.05.2.526733/2022

Jumlah anggaran sebesar Rp. 49.550.000,- Dengan realisasi penyerapannya sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	49.550.000,-	49.531.400,-	99,96 %

REALISASI ANGGARAN DIPA 05						
NO	Satuan Kerja	DIPA	Bulan	REALISASI		
				POSBAKUM	SIDANG KELILING	PRODEO
1	PTUN Jakarta	2023	Januari	-	-	-
			Februari	-	-	-
			Maret	Rp 3.900.000,00	-	-
			April	Rp 3.000.000,00	-	-
			Mei	Rp 3.000.000,00	-	-
			Juni	Rp 2.100.000,00	-	-
			Juli	Rp 2.900.000,00	-	-
			Agustus	Rp 3.000.000,00	-	-
			September	Rp 2.900.000,00	-	-
			Oktober	Rp 3.100.000,00	-	-
			Nopember	Rp 2.900.000,00	-	-
			Desember	Rp 2.000.000,00	-	Rp 650.000,00
JUMLAH KESELURUHAN				Rp 28.800.000,00	-	Rp 650.000,00



Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# BAB IV PENUTUP



## A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada *Standar Operasional Prosedur* ( SOP ) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2022 sebanyak **169** perkara, dan Perkara Masuk tahun 2023 sebanyak **671** Perkara, maka jumlah perkara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak **840** perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2023 sebanyak **194** perkara.
5. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan terlaksana apabila bidang-bidang dan sub-sub bagian serta

komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

6. LKJIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) pada Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

## **B. SARAN - SARAN**

1. Perlu adanya penambahan SDM ( Sumber Daya Manusia ) untuk mengisi bagian-bagian di sekretariat yang banyak di isi oleh honorer ;
2. Perlu adanya penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2;
3. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam koondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempati;
4. Perlu adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi;
5. Perlu adanya penambahan tenaga outsourcing untuk kebersihan, dan keamanan.

### C. PENUTUP

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) melibatkan semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.



Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# LAMPIRAN

# SK TIM LKJIP



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : *A36* /KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/I/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.1/1865/HM.02.1/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sebaik mungkin;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Jakarta.

**Pada Tanggal** : 31 Januari 2024.

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA,**



**Pratiwi**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 436 /KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/1/2024  
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

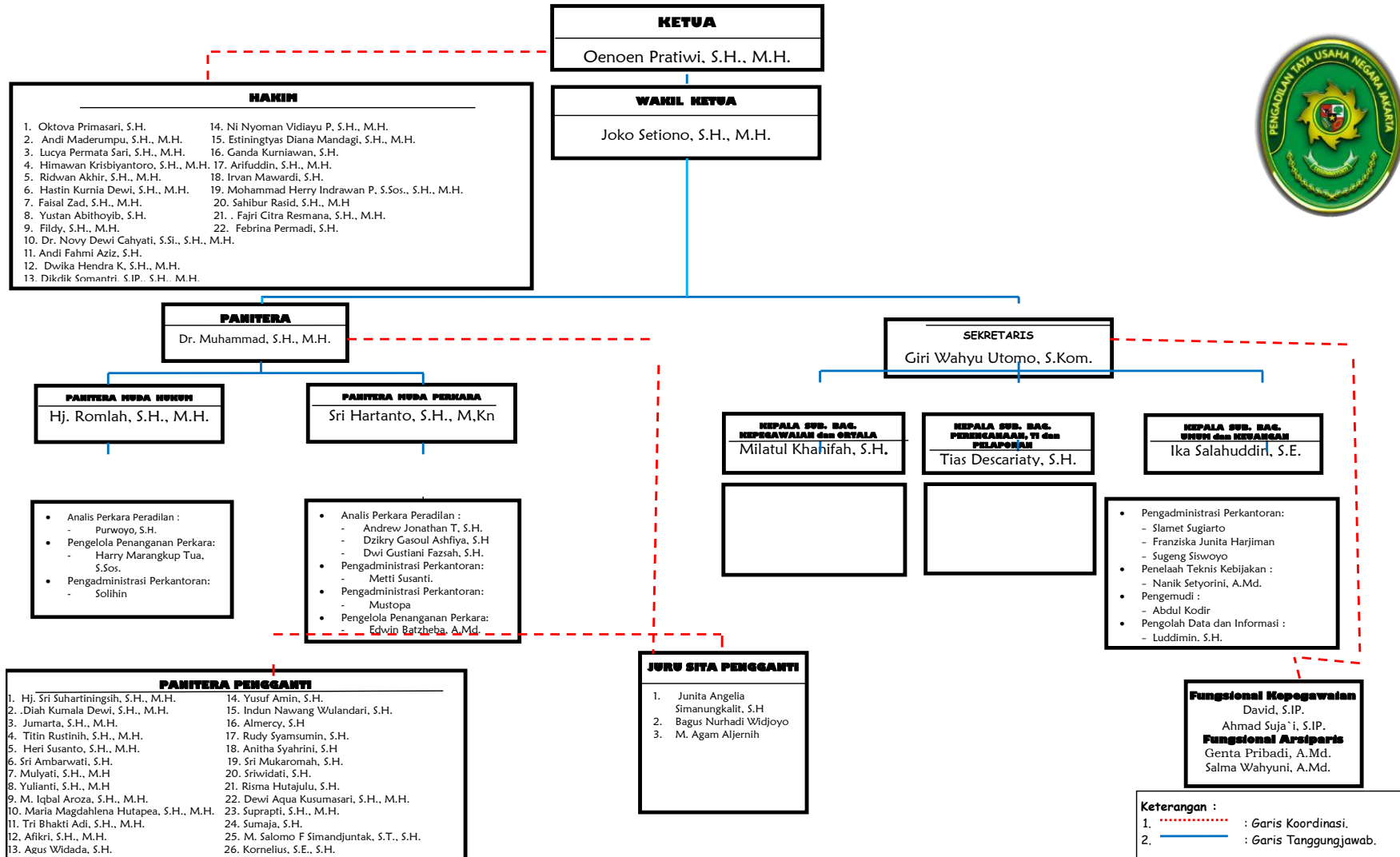
NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Koordinator Validasi Data	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 5. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA,**



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023



**REVIU INDKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100%</b> <b>Jumlah perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi</u> X 100%</b> <b>Jumlah perkara diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi</li> <li>▪ Jumlah perkara yang yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu</u> X 100%</b> <b>Jumlah putusan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> X 100%</b> <b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )</p>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%</b> <b>Jumlah permohonan layanan hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan</li> <li>▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul> <p>Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti X 100%</b> <b>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BHT = berkekuatan hukum tetap.</li> <li>• Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.</li> <li>• Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Keterangan :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Sisa Perkara Tahun 2022 = 169 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2023 = 671 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2023 = 511 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2023 = 194 Perkara

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{840 \text{ Perkara}}{840 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

**Catatan :**

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

b. Presentase Perkara yang yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$$

• **Banding**

- Perkara Putus Tahun 2023 = 653 Perkara
- Perkara Banding = 367 Perkara
- Perkara Tidak Banding = 286 Perkara

$$\frac{286 \text{ Perkara}}{840 \text{ Perkara}} \times 100\% = 34\%$$

• **Kasasi**

- Perkara Banding Tahun 2023 = 367 Perkara
- Perkara Kasasi = 154 Perkara
- Perkara Tidak Kasasi = 213 Perkara

$$\frac{213 \text{ Perkara}}{840 \text{ Perkara}} \times 100\% = 25,35\%$$

c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus  $\geq 80$ .

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah **97,13** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,94	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,93	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,89	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,93	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,8	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,98	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,88	Sangat Baik

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{511 \text{ Perkara}}{511 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

**Catatan :**

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

## 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100 \%$$

- b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{97 \text{ Orang}}{97 \text{ Orang}} \times 100 \% = 100 \%$$

## 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Penetapan BHT = 109 Perkara

$$\frac{109 \text{ Perkara}}{109 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

**Catatan :**

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi

## Matriks Reviu Renstra 2020 - 2024

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Kegiatan	Rp71.020.000
			30%		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi	50% 20 %	50% 20 %	50% 20 %	30% 30 %	34% 25 %					
			100%		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen PeradilanMiliter dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	1 Kegiatan	Rp 71.020.000
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen PeradilanMiliter dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Perkara	Rp 1.020.000
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	97 orang				Rp 33.000.000	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen PeradilanMiliter dan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Persentase Putusan Perkara TUN yang di tindaklanjuti	-	-

## RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

### Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	34% 25%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	34% 25%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. OYO SUNARYO, SH, MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2024

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta

H. Oyo Sunaryo, SH, MH  
NIP. 195806101985031001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta

Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.  
NIP. 197210261992032001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	34 % 25 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.232.636.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 71.020.000,-

Jakarta, 26 Februari 2024

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta



H. Oyo Sunaryo, SH, MH  
NIP. 195806101985031001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta



Oenen Pratiwi, S.H., M.H.  
NIP. 197210261992032001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sarana Kegiatan PTUN Jakarta	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi	30% 30%	34% 25,35%	113% 84,5%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	97,13%	97,13%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis I					99 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis II					100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Preode Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis III					100 %
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN Yang ditindak lanjutin	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis IV					100 %

## RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
		Banding	34%	34%	34%	34%
		Kasasi	25%	25%	25%	25%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA ( Rp )
		I	II	III	IV				
1.	a. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√	√	Sisa perkara tahun 2023	Program Dukungan Manajemen		Rp. 71.020.000
	b. Meningkatkan kualitas putusan	√	√	√	√	Putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan			

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA ( Rp )
		I	II	III	IV				
	c. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.	√	√	√	√	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
	d. Minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi perkara tepat waktu			
	e. Mendata putusan perkara Tingkat Banding yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan Tingkat Banding yang berkualitas			
	f. Mendata Perkara yang tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi pada pengadilan Tingkat pertama	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan hukum Kasasi			
	g. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada PTUN Jakarta	√	√	√	√	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					Putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Rp. 71.020.000
	- Mengirimkan salinan putusan perkara tepat waktu	√	√	√	√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA ( Rp )
		I	II	III	IV				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					Jumlah Perkara Prodeo yang di selesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Rp. 1.020.000
	a. Melaksanakan persidangan perkara Prodeo secara tepat waktu, tranparan, efektif dan efisien.	√	√	√	√				
	b. Menyediakan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum.	√	√	√	√	Layanan Posbakum		Pos Bantuan Hukum	Rp. 33.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-

## PENGHARGAAN

Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat Juara favorit pada lomba Lomba Peningkatan Pelayanan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama. Penghargaan kepada para pemenang diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

